Informasi yang disampaikan pada media ini **dapat berubah sesuai proses pengembangan sistem dan ketentuan perpajakan terbaru**

Panduan

# Penghitungan Biaya Pinjaman yang dapat Dibebankan untuk Keperluan Penghitungan PPh

## EBITDA, DER, dan Biaya Pinjaman

Direktorat P2Humas © 2026
Versi 20260313

# Lampiran 11-B

## Penghitungan Biaya Pinjaman yang dapat Dibebankan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan

A. Perhitungan EBITDA
B. Perbandingan antara Utang dan Modal *(Debt to Equity Ratio)*
C. Penghitungan Biaya Pinjaman

ⓘ Lampiran ini secara *default* akan terbuka untuk semua jenis wajib pajak. Namun, tidak seluruh Wajib Pajak perlu mengisi dalam hal memenuhi ketentuan pengecualian pada peraturan penghitungan biaya pinjaman yang berlaku (169/PMK.010/2015)

# L11B : Perhitungan Biaya Pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan Penghitungan PPh

**Lampiran 11B** digunakan untuk melaporkan biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan PPh.

**Terisi otomatis** sesuai perhitungan *Earning Before Interest ,Tax, Depreciation, and Amortization (EBITDA)*

**Dapat diubah** sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Terdiri dari **3 bagian** dan **1 pernyataan**:

I. **Perhitungan EBITDA**
II. **Perbandingan Antara Utang dan Modal *(Debt to Equity Ratio)***
III. **Penghitungan Biaya Pinjaman**
IV. **Pernyataan terkait utang swasta luar negeri**

# L11B : Perhitungan Biaya Pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan Penghitungan PPh

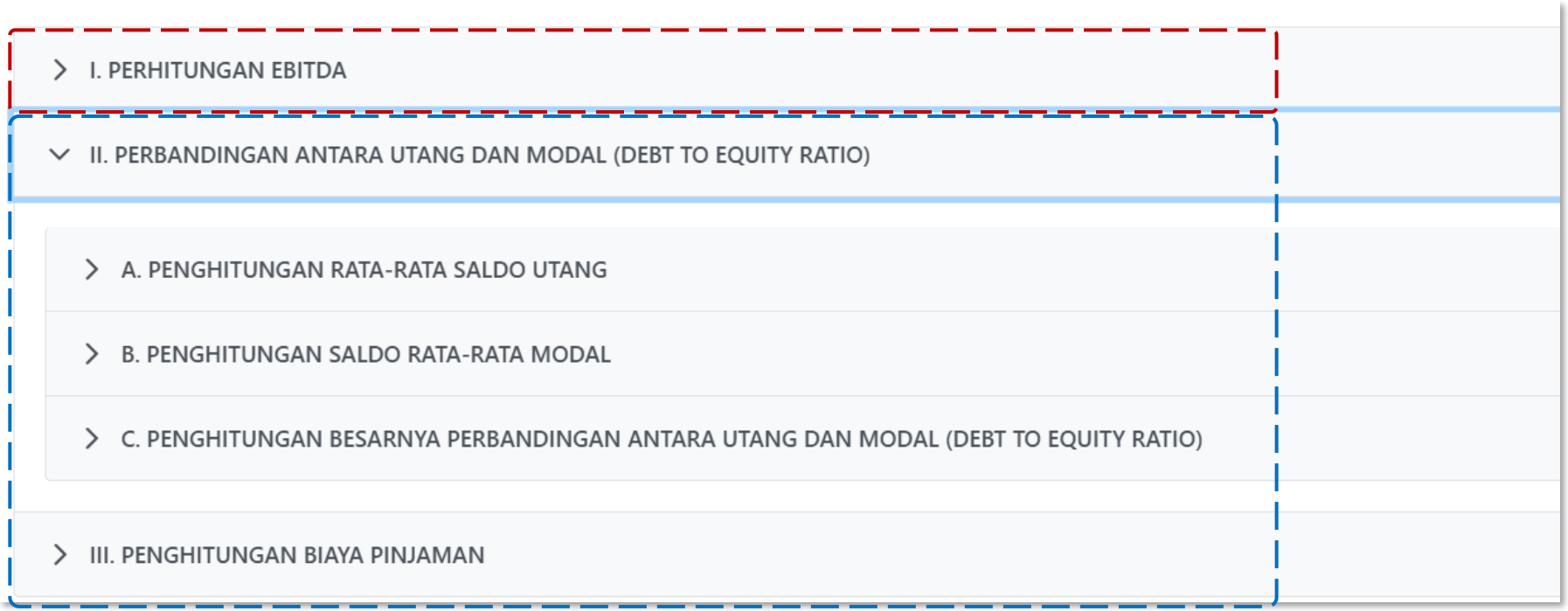


Bagian **I. Perhitungan EBITDA** dan **II. Perbandingan Antara Utang dan Modal *(Debt to Equity Ratio)*** adalah **2** metode yang dapat **dipilih salah satu saja.** Dalam hal belum ada aturan teknis terkait EBITDA, maka kolom EBITDA diisi dengan angka 0 (nol), sehingga dapat mengisi bagian II dan bagian III.

Bagian **III. PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN** huruf **(e) BIAYA PINJAMAN YANG TIDAK DAPAT DIPERHITUNGKAN** yang diisi dipindahkan secara key-in sebagai penyesuaian fiskal pada lampiran L-1 pada akun BEBAN BUNGA.

Penentuan batas biaya pinjaman yang bisa jadi pengurang pajak di Indonesia memakai metode yang umumnya digunakan di tingkat internasional, meliputi:

- **Rasio utang terhadap modal (DER)**: membandingkan jumlah utang dan modal perusahaan.
- **Persentase dari biaya pinjaman dibanding EBITDA**: membandingkan bunga pinjaman dengan laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi; atau metode lain yang wajar.

Jika belum ada peraturan teknis perhitungan biaya pinjaman dengan metode **EBITDA**, maka kolom EBITDA di lampiran SPT boleh **diisi angka 0 (nol), selanjutnya dapat mengisi DER**

djp Reformasi Perpajakan SIAP Sistem Inti Administrasi Perpajakan

# PERHITUNGAN Earning Before Interest ,Tax, Depreciation, and Amortization (EBITDA)

November 2025

# L11B : Perhitungan EBITDA

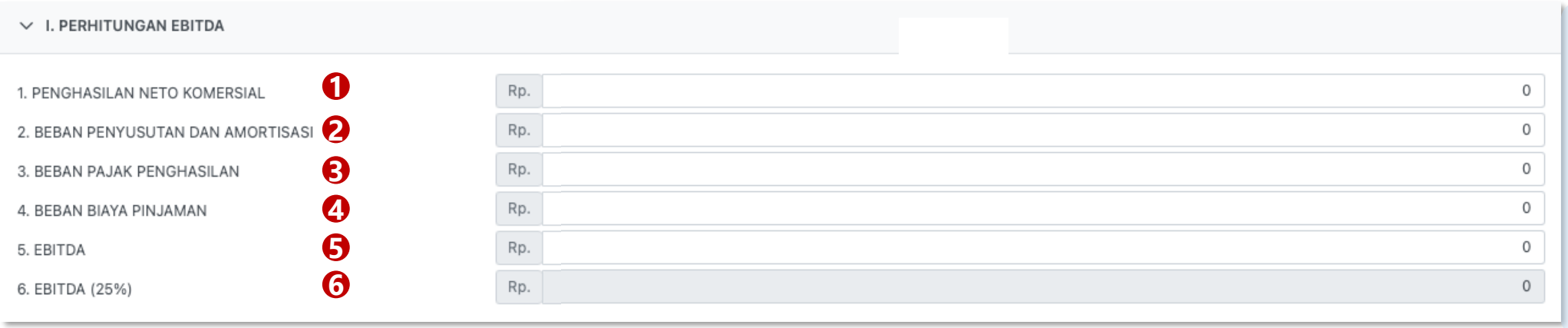


**Bagian I Perhitungan EBITDA**

Terisi otomatis, namun **dapat diisikan 0** jika pengaturan teknisnya belum ada

**[1] PENGHASILAN NETO KOMERSIAL**
Bagian ini diisi dengan nilai yang terdapat pada akun Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada kolom NILAI (KOMERSIAL) pada Lampiran 1.

**[2] BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI**
Bagian ini diisi dengan nilai pada akun Beban Penyusutan dan Amortisasi pada kolom NILAI (KOMERSIAL) pada Lampiran 1.

**[3] BEBAN PAJAK PENGHASILAN**
Bagian ini diisi dengan nilai yang tercantum pada formulir **Induk Bagian D angka 12. PPh TERUTANG.**

[4] **BEBAN BIAYA PINJAMAN**
Bagian ini diisi dengan nilai biaya yang ditanggung Wajib Pajak sehubungan dengan pinjaman sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

**[5] EBITDA**
Bagian ini diisi dengan hasil penjumlahan angka **1**+**2**+**3**+**4**

**[6] EBITDA (%)**
Bagian ini diisi dengan hasil perhitungan **Persentase Tertentu** *) **x EBITDA**

djp Reformasi Perpajakan SIAP Sistem Inti Administrasi Perpajakan

# PERHITUNGAN DEBT EQUITY RATIO (DER)

November 2025

# L11B II : Perbandingan Antara Utang dan Modal (Debt to Equity Ratio)

> I. PERHITUNGAN EBITDA

v II. PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL (DEBT TO EQUITY RATIO)

> A. PENGHITUNGAN RATA-RATA SALDO UTANG

> B. PENGHITUNGAN SALDO RATA-RATA MODAL

v C. PENGHITUNGAN BESARNYA PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL (DEBT TO EQUITY RATIO)

**PERHITUNGAN DER** $= \dfrac{\text{Jumlah Saldo Rata-Rata Utang}}{\text{Jumlah Saldo Rata-Rata Modal}} = \dfrac{0}{0} =$ **N/A**

> III. PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN

Simpan konsep | Bayar dan Lapor

**Bagian II Perbandingan Antara Utang dan Modal (Debt to Equity Ratio)** terbagi menjadi 3 bagian, yaitu:

A. Penghitungan rata-rata saldo utang
B. Penghitungan saldo rata-rata modal
C. Penghitungan besarnya perbandingan

Bagian ini diisi Wajib Pajak untuk menyampaikan Perhitungan Perbandingan antara Utang dan Modal sehubungan dengan ketentuan perbandingan 4:1 sebagaimana diatur pasal 2 ayat 2 PMK 169 Tahun 2015

**Dikecualikan** dari ketentuan perbandingan 4:1 adalah wajib pajak: Bank, lembaga pembiayaan, asuransi dan reasuransi, seluruh penghasilannya dikenakan final, usaha di bidang infrastruktur, atau usaha migas/tambang sesuai/tambang lainnya yang terikat kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian Kerjasama.

ⓘ Referensi ketentuan 169/PMK.010/2015

# Ilustrasi Kasus

Penghitungan Perbandingan Utang Dan Modal Serta Biaya Pinjaman Yang Dapat Diperhitungkan Dalam Menghitung Penghasilan Kena Pajak

**PT XXX** merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur. Berdasarkan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi yang disampaikan oleh **PT XXX** , diketahui hal-hal sebagai berikut:

Liabilitas (dalam juta Rupiah):

| Liabilitas | Posisi per 31 Desember | |
|---|---|---|
| | Tahun 2016 | Tahun 2015 |
| a. Utang Dagang | | |
| - *Interest Bearing* | 810.000 | 800.000 |
| - *Non-Interest Bearing* | 700.000 | 600.000 |
| b. Pinjaman Tanpa Bunga dari XXX Ltd (Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa) | 50.000 | 50.000 |
| c. Utang Jangka Pendek | | |
| - Utang kepada PT ABC (Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa) | 725.000 | 800.000 |
| d. Utang Jangka Panjang: | | |
| - Utang kepada PT JKL | 660.000 | 900.000 |
| - Utang kepada WWW Co. Ltd. | 1.970.000 | 2.500.000 |

Ekuitas (dalam juta Rupiah):

| Ekuitas | Posisi per 31 Desember | |
|---|---|---|
| | Tahun 2016 | Tahun 2015 |
| a. Modal Saham | 150.000 | 150.000 |
| b. Agio Saham | 110.000 | 110.000 |
| c. Laba Ditahan | 475.000 | 425.000 |

**Penghasilan bruto** sebesar Rp20.000.000.000.000,00.

**Biaya pinjaman** (biaya bunga dan biaya terkait lainnya) sebesar Rp228.000.000.000,00 terdiri dari:

a) biaya pinjaman kepada **PT. ABC** sebesar Rp96.000.000.000,00;
b) biaya pinjaman kepada **PT. JKL** sebesar Rp20.660.000.000,00;
c) biaya pinjaman kepada **WWW Co. Ltd** sebesar Rp100.575.000.000,00 dan
d) biaya pinjaman atas **Utang Dagang (Interest Bearing)** sebesar Rp10.765.000.000,00.

Referensi ketentuan 169/PMK.010/2015

# Perhitungan saldo rata-rata utang:

Penghitungan perbandingan utang dan modal (*Debt to Equity Ratio*/DER) berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ini adalah sebagai berikut:

Penghitungan saldo rata-rata utang:

Saldo rata-rata utang dihitung berdasarkan rata-rata saldo utang tiap akhir bulan selama tahun pajak 2016 sebagai berikut :

| Bulan | Saldo Akhir Bulan (dalam Juta Rupiah) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Utang ke PT. ABC | Utang ke PT. JKL | Utang ke WWW Co Ltd | Utang Dagang (Interest Bearing) | Jumlah |
| Januari | 800.000 | 900.000 | 2.500.000 | 800.000 | 5.000.000 |
| Februari | 750.000 | 900.000 | 2.500.000 | 790.000 | 4.940.000 |
| Maret | 750.000 | 900.000 | 2.500.000 | 750.000 | 4.900.000 |
| April | 750.000 | 900.000 | 2.500.000 | 820.000 | 4.970.000 |
| Mei | 740.000 | 900.000 | 2.500.000 | 850.000 | 4.990.000 |
| Juni | 740.000 | 900.000 | 2.500.000 | 720.000 | 4.860.000 |
| Juli | 740.000 | 660.000 | 1.970.000 | 800.000 | 4.170.000 |
| Agustus | 740.000 | 660.000 | 1.970.000 | 810.000 | 4.180.000 |
| September | 725.000 | 660.000 | 1.970.000 | 845.000 | 4.200.000 |
| Oktober | 725.000 | 660.000 | 1.970.000 | 860.000 | 4.215.000 |
| November | 725.000 | 660.000 | 1.970.000 | 805.000 | 4.160.000 |
| Desember | 725.000 | 660.000 | 1.970.000 | 810.000 | 4.165.000 |
| Rata-Rata | 742.500 | 780.000 | 2.235.000 | 805.000 | 4.562.500 |

Jumlah **saldo rata-rata utang** PT. XXX tahun 2016 = **Rp4.562.500.000.000,00**

Referensi ketentuan 169/PMK.010/2015

# Penghitungan saldo rata-rata modal:

Saldo rata-rata modal dihitung berdasarkan rata-rata saldo modal tiap akhir bulan selama tahun pajak 2016 sebagai berikut:

| Bulan | Saldo Akhir Bulan (dalam juta Rupiah) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Modal Saham | Agio Saham | Laba Ditahan | Pinjaman Tanpa Bunga dari XXX Ltd | Jumlah |
| Januari | 150.000 | 110.000 | 425.000 | 50.000 | 735.000 |
| Februari | 150.000 | 110.000 | 425.000 | 50.000 | 735.000 |
| Maret | 150.000 | 110.000 | 575.000 | 50.000 | 885.000 |
| April | 150.000 | 110.000 | 300.000 | 50.000 | 610.000 |
| Mei | 150.000 | 110.000 | 300.000 | 70.000 | 630.000 |
| Juni | 150.000 | 110.000 | 600.000 | 70.000 | 930.000 |
| Juli | 150.000 | 110.000 | 400.000 | 70.000 | 730.000 |
| Agustus | 150.000 | 110.000 | 400.000 | 30.000 | 690.000 |
| September | 150.000 | 110.000 | 700.000 | 30.000 | 990.000 |
| Oktober | 150.000 | 110.000 | 400.000 | 30.000 | 690.000 |
| November | 150.000 | 110.000 | 400.000 | 50.000 | 710.000 |
| Desember | 150.000 | 110.000 | 475.000 | 50.000 | 785.000 |
| Rata-Rata | 150.000 | 110.000 | 450.000 | 50.000 | 760.000 |

**saldo rata-rata modal**
PT. XXX tahun 2016 =
**Rp760.000.000.000,00**

## Besar DER

$$\frac{\text{Rp4.562.500.000.000}}{\text{Rp760.000.000.000}} = \frac{\mathbf{6}}{\mathbf{1}}$$

Besar DER paling tinggi yang diperkenankan
**= 4 : 1**

Referensi ketentuan 169/PMK.010/2015

# ⓘ Penghitungan biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan

dalam menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ini adalah sebagai berikut

Biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak =

**4/6 x biaya pinjaman dari masing-masing utang:**

yaitu Rp152.000.000.000.000,00; dengan penghitungan sebagai berikut:

(Dalam Juta Rupiah)

| Jenis Utang | Saldo Rata-Rata Utang | Biaya Pinjaman | Biaya Pinjaman yang dapat Diperhitungkan | Nilai Koreksi Fiskal atas Biaya Pinjaman |
|---|---|---|---|---|
| Utang kepada PT ABC | 742,500 | 96,000 | 64,000 | 32,000 |
| Utang kepada PT JKL | 780,000 | 20,660 | 12,773 | 7,887 |
| Utang kepada WWW C Ltd | 2,235,000 | 100,575 | 67,050 | 33,525 |
| Utang Dagang (Interest Bearing) | 805,000 | 10,765 | 7,177 | 3,588 |
| Total | 4,562,500 | 228,000 | 151,000 | 77,000 |

**4/6 x biaya pinjaman dari masing-masing utang.**

Nilai Koreksi dipindahkan pada Koreksi Fiskal atas Biaya Pinjaman

ⓘ Referensi ketentuan 169/PMK.010/2015

# L11B - IIA : Perbandingan Rata-Rata Saldo Utang

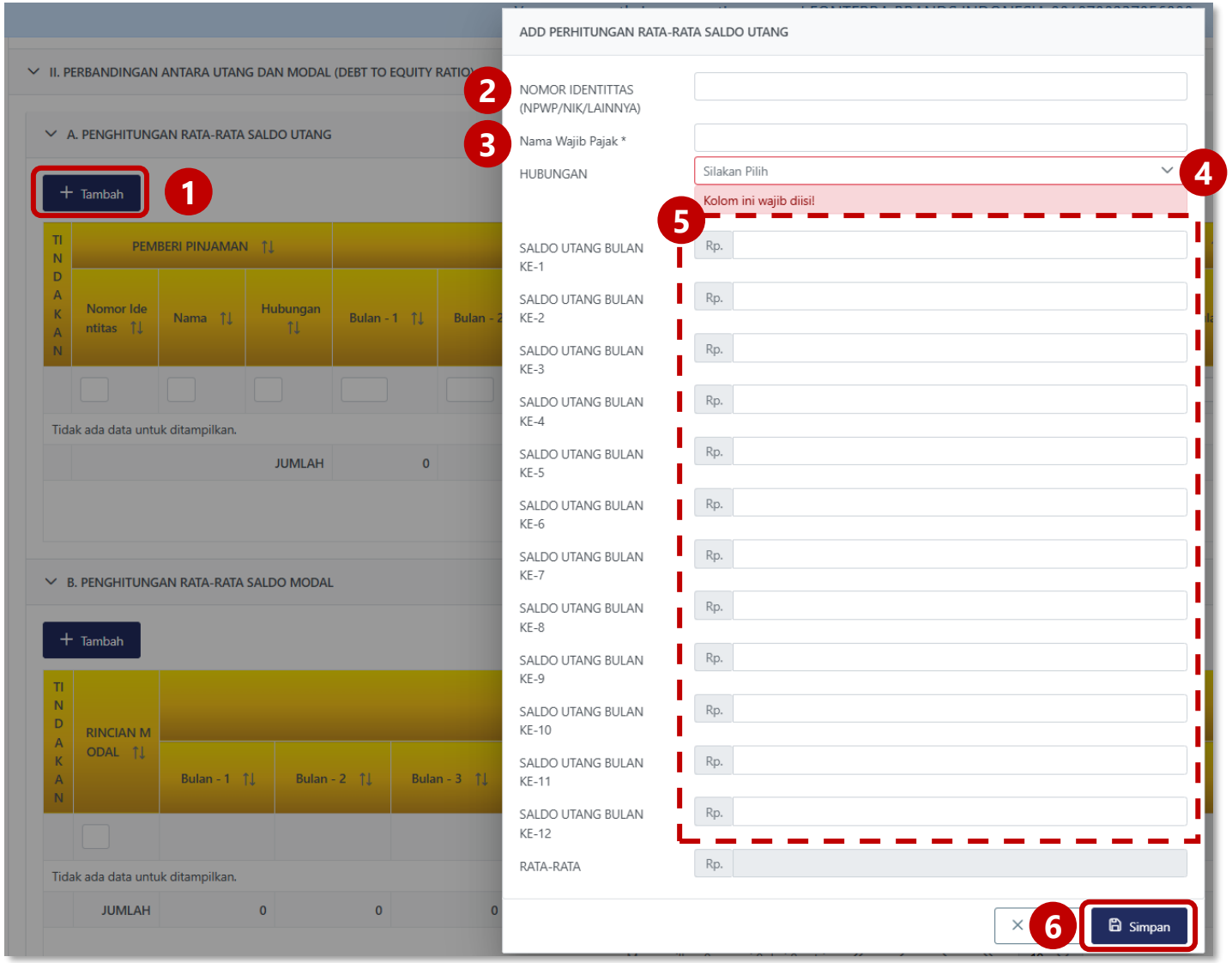


Dengan mengklik icon **"+ Tambah"** **[1]**, wajib pajak dapat menambah data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

**[2]** diisi dengan nomor identitas pemberi pinjaman.

**[3]** diisi dengan nama lengkap pemberi pinjaman (terisi otomatis jika angka 1 diisi dengan NPWP/NIK yang valid).

**[4]** diisi dengan status hubungan antara Kreditur dengan WP (debitur).
Terdapat pilihan yaitu:
(1) afiliasi atau
(2) Independen

**[5]** diisi dengan nominal saldo utang per bulan sesuai dengan kolom yang disediakan

**[6]** Simpan data yang telah diinput dengan mengklik tombol **"simpan"**

# L11B - IIB : Perbandingan Rata-Rata Saldo Modal

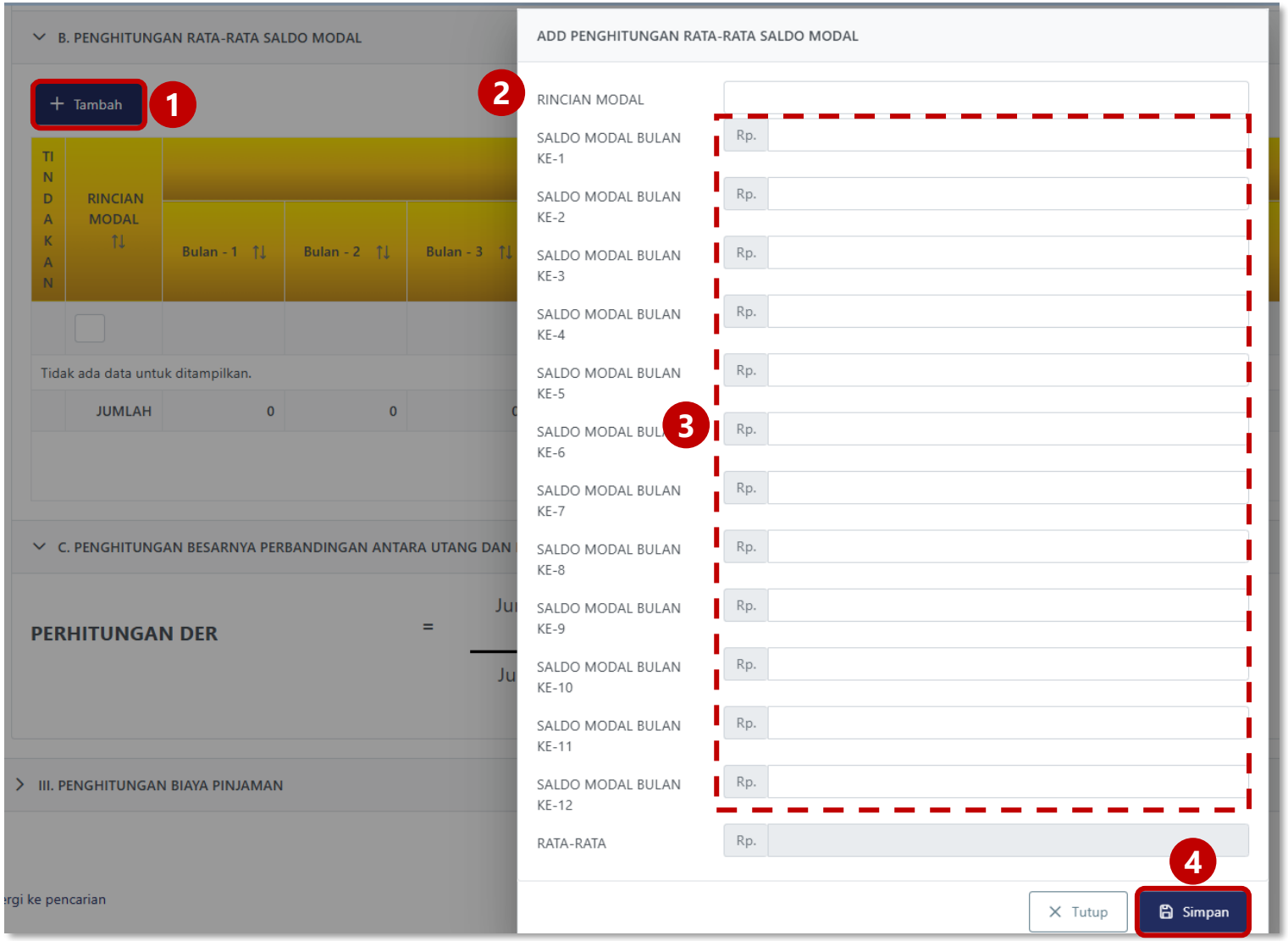


Dengan mengklik icon "**+ Tambah**" **[1]**, wajib pajak dapat menambah data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

**[2]** Diisi dengan catatan yang menjelaskan detil informasi modal.

**[3]** Diisi dengan nominal saldo Modal per bulan sesuai dengan kolom yang disediakan

**[4]** Simpan data yang telah diinput dengan mengklik tombol "**simpan**"

# L11B - IIC : Perhitungan DER (Debt to Equity Rasio)

C. PENGHITUNGAN BESARNYA PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL (DEBT TO EQUITY RATIO)

$$\textbf{PERHITUNGAN DER} = \frac{\text{Jumlah Rata-Rata Saldo Utang}}{\text{Jumlah Rata-rata Saldo Modal}} = \frac{0}{0} = \textbf{N/A}$$

**Bagian C** akan **terisi otomatis** jika data pada bagian A dan B telah diisi.

Contoh:
Apabila jumlah saldo rata-rata utang yang berasal dari Bagian II.A sebesar Rp1.680.000.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah) dan jumlah saldo rata-rata modal yang berasal dari Bagian II.B adalah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), maka pengisian bagian ini sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah saldo rata-rata utang}}{\text{Jumlah saldo rata-rata modal}} = \frac{1.680.000.000}{280.000.000} = 6 : 1$$

"Sesuai ketentuan **PMK 169 Tahun 2015** Besarnya perbandingan antara utang dan modal ditetapkan paling tinggi sebesar **empat dibanding satu (4: 1)"**

Jika melebihi dari yang ditetapkan, maka Biaya Pinjaman yang dapat diperhitungan **perlu disesuaikan maksimal sebesar 4:1**

Merujuk ke contoh, maka penyesuaian besaran biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan adalah sebesar Rp1.120.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh juta rupiah)

**dikecualikan** dari ketentuan di atas bagi Wajib Pajak tertentu sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat 2 PMK 169 Tahun 2015

djp Reformasi Perpajakan SIAP Sistem Inti Administrasi Perpajakan

# PERHITUNGAN BIAYA PINJAMAN

November 2025

# L11B - III : Perhitungan Biaya Pinjaman

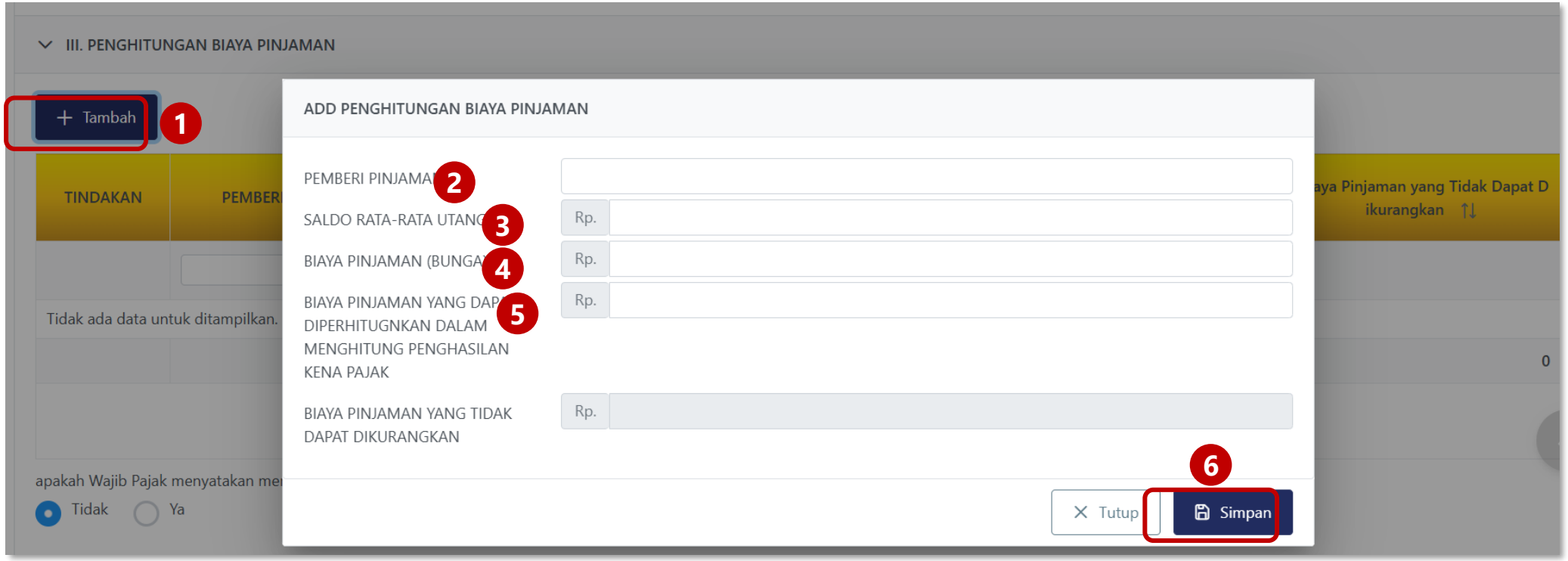


Dengan mengklik icon **"+ Tambah"** [1], wajib pajak dapat menambah data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

[2] Diisi dengan nama pemberi pinjaman.
[3] Diisi dengan saldo rata-rata utang dalam satu tahun.
[4] Diisi dengan bunga atas pinjaman yang diterima
[5] Diisi dengan biaya yang dapat diperhitungkan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku
[6] Simpan data yang telah diinput dengan mengklik tombol "**simpan**"

# Link Materi Edukasi

SPT Tahunan PPh pada Coretax

Pindai di Sini

## Video Panduan

Youtube **@DitjenPajakRI**

Pindai di Sini

## **Salindia** (Slide)

www.pajak.go.id/id/**lapor-tahunan**

Pindai di Sini

## Simulator Terpandu

**spt-simulasi**.pajak.go.id

# Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh

**Hati-Hati Penipuan** Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak

**1500200**

Atau hubungi unit kerja DJP

**pajak.go.id/unit-kerja**

djp

# Terima kasih

*Pajak Kita, Untuk Kita*

DitjenPajakRI www.pajak.go.id 1 500 200

djp Reformasi Perpajakan SIAP Sistem Inti Administrasi Perpajakan

# LAMPIRAN

November 2025

# Prefiling dan Validasi SPT Tahunan PPh Badan di Coretax

| Nama Form | Keterangan | Prepopulated (P) / Key-in (K) | Mandatory (M) / Conditional (C)) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Induk | Induk SPT | P/K | M | Skema Pertanyaan |
| Lampiran 1 | Rekonsiliasi Laporan Keuangan | P/K | M | Dalam hal WP menyampaikan LK dalam format XBRL, maka kolom LK Komersial dapat terprepopulated |
| Lampiran 2 | Daftar Kepemilikan | P+K | M | Prepopulated dari data registrasi dan data tahun lalu |
| Lampiran 3 | Daftar PPh yang Dipotong/Dipungut Pihak Lain | P+K | C | Kredit Pajak dalam negeri diambil dari data e-Bupot |
| Lampiran 4 | Penghasilan yang Dikenakan Pajak Final dan/atau Bersifat Final dan Daftar Penghasilan yang Bukan Objek Pajak | P+K | C | Diambil dari data e-Bupot atau payment |
| Lampiran 5 | Daftar Peredaran Bruto | P+K | C | hanya diisi oleh WP PP23. Data gross-up dari data pembayaran |
| Lampiran 6 | Angsuran Tahun Berjalan | P+K | C | hanya bagi WP yang tidak diwajibkan SPT Masa PPh Pasal 25 |
| Lampiran 7 | Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal | P+K | C | hanya bagi WP yang masih memiliki kompensasi rugi fiskal |
| Lampiran 8 | Penghitungan Fasilitas Pengurangan Tarif PPh Pasal 31E ayat (1) UU PPh | P+K | C | Diisi oleh WP yang mendapat fasilitas tarif PPh Pasal 31E |
| Lampiran 9 | Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal | P+K | C | hanya bagi WP yang memiliki koreksi fiskal atas penyusutan Data prepop dari tahun lalu dan bisa diedit |

3 Mandatory

24 Conditional

1 Prepop/Key-in
17 Prepop + Key-in
4 Key-in

# Prefiling dan Validasi SPT Tahunan PPh Badan di Coretax

| Nama Form | Keterangan | Prepopulated (P) / Key-in (K) | Mandatory (M) / Conditional (C)) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Lampiran 10A – Lampiran 10C | Pernyataan Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa | K | C | hanya bagi WP yang memiliki transaksi hubungan istimewa |
| Lampiran 10D | Ikhtisar Dokumen Induk dan Dokumen Lokal | K | C | hanya bagi WP yang melewati threshold transaksi hubungan istimewa |
| Lampiran 11A | Kelengkapan Biaya Tertentu | P+K | C | hanya jika WP akan membebankan biaya tertentu |
| Lampiran 11B | Penghitungan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal | P+K | M | Diisi oleh semua WP Badan |
| Lampiran 11C | Laporan Utang Swasta Luar Negeri | K | C | hanya bagi WP yang memiliki utang swasta luar negeri |
| Lampiran 12A | Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) | P+K | C | hanya bagi WP BUT |
| Lampiran 12B | Laporan Realisasi Reinvestasi Laba Setelah Pajak BUT | K | C | hanya bagi WP BUT yang Reinvestasi Laba Setelah Pajak |
| Lampiran 13A | Daftar Fasilitas Penanaman Modal | P+K | C | hanya bagi WP yang memiliki fasilitas (tax allowance) |
| Lampiran 13B | Daftar Tambahan Pengurang Penghasilan Bruto | P+K | C | hanya bagi WP yang memiliki fasilitas (super deduction) |
| Lampiran 13C | Daftar Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan | P+K | C | hanya bagi WP yang memiliki fasilitas (tax holiday) |
| Lampiran 14 | Penggunaan Sisa Lebih | P+K | C | hanya bagi WP yang memiliki Sisa Lebih |
| Lampiran 15A–15G | Kelengkapan WP K3S Migas | P+K | C | hanya bagi WP K3S |

3 Mandatory

24 Conditional

1 Prepop/Key-in
17 Prepop + Key-in
4 Key-in